

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa maraknya broker, korupsi oleh berbagai oknum pemerintah, serta ketidakpatuhan terhadap TVPRA merupakan faktor utama penghambat upaya penanganan perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand. Dalam laporan TIP, AS menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam memerangi kasus kejahatan kemanusiaan di suatu negara. Pasca dirilisnya video dokumenter *'Sold to the Sea'* sebagai hasil investigasi EJF, berbagai tekanan internasional bermunculan khususnya dari media, organisasi internasional dan NGOs yang meminta Thailand maupun Amerika Serikat untuk segera mengambil tindakan.

Menanggapi tekanan internasional serta surat *Joint NGO Letter* dari organisasi internasional yang fokus dalam penanganan Hak Asasi Manusia, Amerika Serikat pada tahun 2014 dan 2015 menempatkan Thailand di peringkat terendah (Tier 3) dalam *TIP Report*. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan upaya 3P (*prevention, protection, and prosecution*) yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand. Dalam laman resminya, AS menyatakan siap bekerjasama dengan Thailand serta memberikan bantuan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand khususnya provinsi Songkhla. Amerika Serikat dan Thailand mengaktualisasikan kerjasamanya dalam penanganan perbudakan dan perdagangan manusia melalui berbagai program.

Pertama, melalui *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* (DRL) Pemerintah Amerika memberikan perhatian khusus terhadap praktek perbudakan dan perdagangan manusia serta hak buruh di Thailand. DRL berkolaborasi dengan berbagai pihak meliputi Kedutaan Besar AS di Bangkok, USAID, IOM, UNIAP, ILO, NGOs

lokal, Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri Thailand, *stakeholder*, polisi, akademisi serta berbagai pihak lainnya di Thailand. Melalui USAID, DRL memberikan bantuan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kasus perbudakan dan perdagangan para imigran yang dipekerjakan di laut Thailand mencakup provinsi Songkhla sebagai salah satu daerah rawan perdagangan manusia. Pada tahun 2016, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan rencana aksi lima tahun bantuan komprehensif USAID sebanyak \$12 juta di KTT Asia Timur / *East Asia Summit (EAS)* untuk negara-negara ASEAN. Proyek \$1.000.000 pada Februari 2016 ini membantu meningkatkan koordinasi regional, khususnya melalui kerjasama bilateral tentang perlindungan, bantuan, pengembalian, dan reintegrasi untuk korban perdagangan manusia. Adapun Thailand, Malaysia, Burma, dan Laos menonjol sebagai prioritas utama dengan masing-masing negara menerima \$900.000.

Kedua, melalui USAID - Amerika Serikat juga menggandeng berbagai NGOs dan organisasi internasional yang fokus dalam penanganan Hak Asasi Manusia dan Hak Buruh meliputi *Liberty Asia* yang menerima \$650.000, ILO sebesar \$1.5 juta, *Labor Rights Promotion Network* sebesar \$600.000, *Urban Light* sebesar \$250.000, *International Justice Mission* sebesar \$1.000.000, dan *Issara Institute* sebesar \$500.000. Pada tahun 2016 DRL dibawah naungan *U.S Department of State* juga mendanai 1.4 juta dolar untuk menyelenggarakan sebuah workshop dan proyek di Thailand. Topik lokakarya tersebut adalah *Anti-Human Trafficking Workshop 2016*, berikut dengan dua proyek yaitu *Next Level* dan *CTIP Projects*. Organisasi-organisasi internasional dan NGOs diatas membantu pemerintah AS dan Thailand melalui berbagai program, seperti bekerjasama dengan para pemilik kapal dengan memberikan pemahaman terkait perekrutan tenaga kerja, mendorong pemilik kapal untuk membatalkan utang perekrutan dari calon tenaga kerja, mendidik para tenaga kerja tentang hak-hak buruh, mengidentifikasi dan meremediasikan risiko tenaga kerja, mengembangkan layanan konseling untuk para migran korban perdagangan manusia, membuat laporan tahunan mengenai penelusuran praktek-praktek perbudakan dan

perdagangan manusia di laut Thailand, membuat program kampanye *anti-human trafficking* serta melakukan sosialisasi di provinsi Thailand Selatan dan Utara.

Ketiga, melalui *U.S Government-Fund Anti Trafficking in Persons*, AS mengoordinasikan kebijakan antar-lembaga terkait pelaksanaan undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TIP) dan implementasi TPVA. Adapun hasilnya, Thailand mengeluarkan *Thailand's Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013* berisi rencana aksi Thailand untuk menangani perdagangan manusia. Mengadakan kampanye *anti-human trafficking*, meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* pada 16 November 2013. Adapun implementasi dari *Thailand's Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013* adalah Biro Imigrasi meningkatkan identifikasi korban perdagangan manusia dengan memerintahkan semua kantor imigrasi provinsi untuk menggunakan formulir standar dalam mewawancarai migran. Dalam hal ini, kantor imigrasi provinsi Songkla bertugas memegang migran ilegal Myanmar yang memasuki Thailand melalui Mae Sod (provinsi Tak).

Keempat, dalam penanganan masalah korupsi, AS juga memberikan rekomendasi dan masukan kebijakan kepada pemerintah Thailand. Sebagai wujud komitmennya, AS mengirim representatif Sarah Sewal tahun 2014 bekerjasama dengan DRL untuk terjun langsung membahas permasalahan korupsi, perdagangan manusia dan IUU Fishing di Thailand dengan pemerintah dan aparat kepolisian. Adapun rekomendasi yang dimaksud, AS meminta Thailand untuk segera menyelidiki semua laporan keterlibatan pemerintah dalam kasus perdagangan manusia di semua provinsi termasuk Songkhla serta mengadili dan menghukum pelaku. Disamping mengembangkan dan menerapkan prosedur identifikasi korban dan memberikan perlindungan kepada migran asing sebagai hak semua manusia secara global. Sebagai hasilnya dari pertemuan tersebut, setahun setelahnya pengadilan dan penuntutan terhadap Letnan Jenderal Manas Kongpan dilaksanakan bersama tersangka lainnya.

Kelima, pembentukan PI/PO di provinsi Songkhla sebagai kerjasama berkelanjutan antara AS dan Thailand dalam mencapai pemahaman yang lebih besar

tentang perbudakan dan perdagangan manusia, serta wujud upaya kedua negara dalam mengatasi masalah kejahatan kemanusiaan tersebut. Kedutaan Besar AS, DRL dan *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) bekerjasama dengan pemerintah Thailand mengembangkan sistem pengumpulan data strategis yang dirancang untuk menginformasikan, memantau serta meningkatkan keefektifan penanganan perdagangan manusia yang dikenal dengan sistem SIREN (*Strategic Information Response Network*). Adapun hasilnya, 40 petugas PIPO dilatih mengenai teknik wawancara selama proses identifikasi imigran korban perdagangan manusia, pelatihan untuk 41 penerjemah yang berkualitas dengan dibekali ilmu terkait perlindungan korban perdagangan manusia dalam program identifikasi korban perdagangan manusia yang efektif, pengembangan sistem 'Pink Card' untuk imigran asal Myanmar, Laos dan Kamboja. Serta pendistribusian surat kabar *Migrant Times Newsletter* yang didanai oleh bank FED's Amerika Serikat pada tahun 2015.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang dapat diusulkan dari penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

Rekomendasi untuk Pemerintah Thailand

1. Mengembangkan mekanisme pengaduan yang efektif untuk memastikan para migran dapat dengan mudah melakukan pengaduan tanpa gangguan oleh pemilik armada, nahkoda kapal, broker, pejabat pemerintah, atau lainnya.
2. Menambah masa hukuman bagi para terpidana kasus korupsi yang mengambil keuntungan dari kasus perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand, serta para pemilik atau awak kapal yang terbukti melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap para migran selama bekerja.

3. Mengarahkan kementerian tenaga kerja, bekerjasama dengan pihak imigrasi dan polisi setempat untuk mengawasi serta memberantas broker-broker yang bergerak leluasa dalam proses perekrutan di industri perikanan Thailand
4. Rencana kegiatan dan kolaborasi dengan berbagai NGOs, kerjasama dengan organisasi internasional serta negara lain agar dijadikan sebagai program berkelanjutan negara Thailand untuk memastikan angka kasus perbudakan dan perdagangan manusia dapat menurun setiap tahunnya.

Rekomendasi untuk Pemerintah Amerika Serikat

1. Berlaku tegas dan menegakkan secara ketat Undang-Undang Tarif 1930 dalam menginvestigasi dan memblokir impor barang-barang Thailand yang diproduksi oleh korban perbudakan dan perdagangan manusia.
2. Memberlakukan sanksi sesuai amanat TVPA untuk negara yang menduduki Tier 3 berupa penolakan pemberian pinjaman *non-humanitarian* dari IMF maupun *World Bank*.
3. Menginformasikan kepada pemerintah dan asosiasi pengusaha Thailand bahwa agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat akan dengan tegas melakukan inspeksi makanan laut Thailand dan rantai pasokan produk terkait, sampai perdagangan manusia dan kerja paksa dihilangkan dari sektor ini.